

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah lautnya mencapai 3.257.483 km² belum termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 13.667 pulau. Selain itu, Negara Indonesia kaya akan budaya, bahasa dan sumber daya alam yang melimpah ruah. Sebagaimana penegasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Laut beserta wilayah pesisir yang mengitari Indonesia mengandung potensi ekonomi yang sangat besar serta beraneka ragam, hingga Negara Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan terbesar dengan keanekaragaman hayati laut terbesar. Sumber daya hayati yang terdapat dalam laut Indonesia antara lain Ikan, Mangrove, Terumbu karang dan Padang lamun dan Sumber daya non hayati berupa Minyak Bumi, Gas alam, dan Tambang.

Potensi laut yang dimiliki Indonesia terutama bidang perikanan adalah salah satu potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk pembangunan Negara. Perlu dilakukan pemanfaatan secara optimal melalui pemberdayagunaan laut baik itu melalui wisata, tambang maupun pemberdayagunaan sumber daya ikan namun tetap memperhatikan kelestarian laut. Hal ini berdasarkan isi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut Tahun

1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982, menyatakan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 Ayat 3 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka tentunya memiliki aturan hukum mengenai kelautan di Indonesia salah satunya adalah undang-undang perikanan Nomor 31 Tahun 2004, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Peraturan mengenai perikanan tersebut memiliki tujuan dan manfaat yang sangat besar bagi kondisi perikanan di wilayah negara Indonesia dalam rangka pembangunan dan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat.

Akan tetapi, keberadaan akan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam pelaksanaannya belum tentu dilakukan oleh masyarakat karena pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melakukan pemboman ikan. Hal ini menandakan kesadaran hukum nelayan masih sangat kurang. Berbicara masalah kesadaran hukum berarti berbicara tentang pengetahuan, pemahaman, penataan dan penghargaan terhadap hukum serta efektivitas menanamkan hukum.

Disisi lain, kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu persoalan yang ada di dalam penegakan dan pembinaan hukum, akan tetapi berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh sebagaimana dalam ketetapan MPR No. IV/1978-TAP MPR No. IV/1999 telah mencantumkan asas kesadaran hukum sebagai salah satu asas pembangunan nasional yang menyatakan bahwa "asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum".

Terlepas dari GBHN diatas, permasalahan sebenarnya dari kesadaran hukum ialah efektivitas menanamkan hukum tersebut. reaksi masyarakat, dan jangka waktu menanamkan hukum tersebut. Kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor, apakah hukum tersebut diketahui, dihargai dan diataati karena apabila seseorang hanya sekedar mengetahui bahwa ada hukum maka dapat dikatakan kesadaran hukumnya rendah. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kesadaran hukum pemerintah selaku penegak hukum melakukan berbagai upaya guna meningkatnya kesadaran hukum. Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Transisi" telah menyatakan bahwa cara pembinaan kesadaran hukum yaitu dengan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan bantuan hukum.

Ketika masalah kesadaran hukum dikaitkan dengan penggunaan bom ikan maka sudah pasti nelayan secara khusus memerlukan pengetahuan tentang pemeliharaan kekayaan laut sebagai masyarakat yang hidup dan bergantung terhadap laut. Hal ini diamanahkan dalam Undang-undang Negara Republik

Indonesia Nomor 16 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Namun, selain kurangnya kesadaran hukum Nelayan tuntutan ekonomi dan kebutuhan yang besar, menjadikan nelayan mencari jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan bom ikan bagi nelayan sudah menjadi pengetahuan praktis untuk kepentingan dirinya sendiri dan menjadi kebiasaan yang disembunyikan. Tindakan ini kebanyakan dilakukan pada waktu siang karena waktu tersebut digunakan untuk istirahat.

Bom ikan sangat populer digunakan oleh para Nelayan di seluruh Indonesia karena pembuatan dan bahan yang digunakan dalam merakit Bom ikan amatlah sederhana dengan hasil tangkapan yang melimpah. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan usaha dan modal yang seminim mungkin menjadi landasan pendorong bagi nelayan untuk melakukan pengeboman. Keterkaitan keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari menangkap ikan dilaut rupanya menjadikan para nelayan nekat untuk menggunakan bom ikan demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak tanpa memperdulikan keselamatan diri dan lingkungan alam disekitarnya.

Salah satu daerah di Sulawesi selatan yang mengalami kerusakan terumbu karang yaitu Kabupaten pangkep (pangkajene kepulauan), khususnya pada Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten pangkajene dan kepulauan salah satu desanya adalah desa Mattiro Kanja yang memiliki wilayah pesisir dan

kekayaan lautnya sangat besar, dan hal ini menjadi kecenderungan terhadap potensi pengrusakan terhadap terumbu karang yang mengakibatkan kurangnya ikan dilaut. Kerusakan dari terumbu karang ini lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia, baik dari nelayan, pengusaha, pelaku pariwisata, pencemaran, sedimentasi, pengerukan, pemboman, penggunaan racun, serta adanya pembangunan pantai.

Di daerah kepulauan, tentunya mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan. Akan tetapi, dalam hal penggunaan alat tangkap belum sepenuhnya mengikuti aturan perundang-undangan. Seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Hal ini mungkin disebabkan karena pengetahuan hukum nelayan yang kurang atau rendahnya kualitas pendidikan di daerah kepulauan atau karena tuntutan ekonomi. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM NELAYAN TERHADAP PENGGUNAAN BOM IKAN DI KABUPATEN PANGKEP.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat beberapa rumusan masalah untuk membatasi lingkup penelitian dan akan dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom Ikan di Kabupaten Pangkep?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimanakah upaya meningkatkan kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabuapten Pangkep.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Pangkep.
3. Mengetahui upaya meningkatkan kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Negeri Makassar

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan referensi atau bahan rujukan untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidaang yang diteliti.

2. Bagi Instansi Terkait

Melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, khususnya untuk Pemerintah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten

Pangkep mengenai tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang berharga terutama pada bidang yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1) Kesadaran Hukum

a. Defenisi Kesadaran Hukum

Berbicara masalah hukum berarti berbicara mengenai kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat. Hukum tidak akan terbentuk tanpa adanya suatu masyarakat karena hukum merupakan gejala kemasyarakatan, gejala sosial.¹ Hukum dikatakan sebagai gejala sosial karena hukum berfungsi untuk melakukan tugas tertentu dalam masyarakat. Hukum tidak hanya untuk sekadar diketahui atau dipahami. Akan tetapi, perlu untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Ketika seseorang telah melakukan hal tersebut maka itulah yang dikatakan sebagai kesadaran hukum. Menurut Paul Scholten kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.²

Menurut Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa:

Kesadaran hukum adalah adanya anggota-anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena mereka merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain mereka dengan kesadarannya mematuhi bahwa hukum itu berasal

¹ Utrecht. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar harapan. Hal 1

² Syamsul Bakhri. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: UNM. Hal 116

dari hati nuraninya sendiri, inilah yang dikatakan adanya kesadaran hukum yang mantap.³

Pandangan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang betul-betul tercipta dari dalam diri seseorang di karenakan mereka memahami arti penting dari hukum tersebut. Artinya bahwa kesadaran hukum pada dasarnya ada dalam diri setiap individu (manusia).

b. Faktor Kesadaran Hukum

Permasalahan mengenai kesadaran hukum tidaklah sederhana sebagaimana defenisinya. Akan tetapi, permasalahan kesadaran hukum sehubungan dengan efektivitas menanamkan hukum, reaksi dan waktu yang digunakan untuk menanamkan hukum tersebut. Menurut H. Krabbe dan R. Kranenburg bahwa “sumber satu-satunya dari hokum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat”.⁴ Maka dari itu penanaman kesadaran hukum sangatlah penting.

Selain itu, kesadaran hukum tidak hanya mengenai pelaksanaan dan pembinaan hukum akan tetapi juga mengenai pembangunan nasional. Hal ini berdasarkan dalam ketetapan MPR NO. IV/MPR/1978-TAP MPR NO. IV/1999 yang didalamnya dicantumkan asas kesadaran hukum sebagai salah satu asas pembangunan Nasional. Dalam GBHN 1978, 1993, dan 1999 dikatakan bahwa “asas kesadaran hukum ialah bahwa tiap warga

³ Asmadi.2004. *Skripsi Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.UNM. hal 13.

⁴Syamsul bakhri. Op.cit. Hal 117

Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum”.⁵

Jadi, terdapat dua poin penting dalam permasalahan kesadaran hukum yaitu pembangunan dalam bidang hukum itu sendiri (meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan meningkatkan pembinaan sikap terhadap pelaksanaan hukum) dan pembangunan dalam bidang Nasional (kesadaran hukum dapat menciptakan sarana yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

Ada empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukumnya sendiri (UU), faktor penegakan hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁶

Indikator kesadaran hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto adalah:

1. Pengetahuan Hukum (*law awareness*), seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut meyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang dibolehkan oleh hukum.

⁵ Syamsul bakhri. Ibid.

⁶ Saifullah. 2006. *Sosiologi Hukum*. Malang: refika aditama. Hal 105

2. Pemahaman Hukum (*law acsuitances*), seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
3. Sikap Hukum (*legal attitude*) seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola Perilaku Hukum (*legal behaviour*), Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.⁷

Kesadaran hukum yang ideal tidak cukup jika hanya melihat pada wujud tingkah laku kepatuhan pada hukum saja, akan tetapi latar belakang mengapa orang patuh terhadap hukum juga harus menjadi perhatian, yang menurut Herbert Kelman dikatakan bahwa; kesadaran hukum dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan yakni:

- a) *Compliance* Pada tingkat ini individu patuh pada hukum disebabkan karena dia takut akan mendapat hukuman bila ia tidak patuh pada peraturan. Kesadaran ini sangat rendah. Orang akan melanggar peraturan selama ia tahu bahwa tidak ada orang yang mengetahuinya.
- b) *Identification* Pada tingkat ini, kepatuhan akan hukum disebabkan oleh karena individu bersimpati kepada sipembuat atau sipengatur hukum. Pada tingkat ini, selama hukum dibuat oleh orang-orang atau instansi yang disenangi individu tersebut, hukum cenderung lebih dipatuhi. Namun sekali terjadi perubahan sikap senang kesikap tidak senang, maka kepatuhan hukum jadi berkurang. Pada tingkat ini rasa frustrasi terhadap pemerintah akan merangsang orang untuk melanggar hukum.
- c) *Internalization* Kepatuhan hukum pada tingkat ini disebabkan oleh karena individu merasa bahwa hukum diterapkan sangat cocok dengan prinsip-prinsip atau norma-norma hidupnya. Pada tingkat ini

⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Hukum Adat Indonesia*. . Jakarta: Rajawali Pers. Hal 228

individu menginternalisasikan hukum sebagai prinsip hidup. Bila individu melanggar hukum dia merasa seakan-akan telah melanggar prinsip hidupnya sendiri. Ditingkat ini kesadaran hukum sangat tinggi. Kepatuhan betul-betul muncul dari dirinya, bukan karena takut akan dihukum⁸.

Untuk mencapai kesadaran hukum tingkat internalisasi, maka harus ada kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan norma hidup masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo “Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk menunjukkan nilai-nilai tertentu didalam masyarakat, juga terikat pada bahan-bahan yang dapat disediakan oleh masyarakat”. Hal ini mengartikan bahwa hukum yang ada sangatlah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku masyarakat.

Selanjutnya, menurut Ahmad Sunusi untuk mencapai nilai-nilai kesadaran hukum seseorang yaitu dengan pola-pola sebagai berikut (1) Takut akan hukuman, kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada rasa takut, khawatir akan sanksi yang dikenakan apabila melanggar hukum tersebut. (2) Pragmatisme instrumental, kesadaran hukum didasarkan pada adanya peraturan umum. (3) Rasa senasib interpersonal, kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada adanya eksepsi dari kelompok terhadap yang bersangkutan. (4) Komformasi kemasyarakatan, kesadaran hukum dan penataannya didasarkan pada sikap komformasi pada kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan yang sedang jadi preferensi dari penguasa dan golongan elitnya. (5)

⁸ Djamaluddin ancok. 1982. *Masalah Kesadaran Hukum Dan Pelayanan Hukum, Suatu Tinjauan Psikologi Sosial*. Masalah Yang Disampaikan Pada Seminar Nasional Kesadaran Hukum Kerjasama UGM Dan Kejaksaan Agung RI Yogyakarta. Hal 2

Kemajuan/kepentingan umum, kesadaran hukum dan penataan hukum didasarkan pada kemajuan dan kepentingan umum, yaitu telah diuji standarnya dengan seksama secara demokrasi atas dasar keahlian. (6) etika universal, kesadaran hukum dan penataannya didasarkan pada kaidah umum kesusilaan bagi martabat manusia.⁹

c. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Upaya-upaya yang mesti dilakukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan pengetahuan hukum tertentu atau yang lebih sederhananya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal perundang-undangan. Apabila masyarakat mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar maka dapat dikatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Namun sebaliknya, ketika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut tidak dijawab dengan benar maka dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang memiliki pengetahuan hukum.¹⁰

Peningkatan pengetahuan hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesadaran hukum. Apabila dikaitkan dengan masalah kesadaran hukum dalam hal penggunaan bom ikan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pasal 47 yaitu:

⁹ Awaluddin, Kesadaran hukum terhadap kepemilikan tanah Makassar FIS UNM, 2008, hlm 10

¹⁰ H. Zainuddin Ali. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 66-69

Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya secara spesifik juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pasal 1 :

- (1) Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
- (2) Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku utama dijelaskan dalam Undang-undang yang sama pasal 19 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan:

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun non formal.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan serta manfaat dari peraturan perundang-undangan.

3. Penataan Hukum

Seseorang menaati hukum karena berbagai sebab yaitu:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingannya terjamin.

4. Penghargaan terhadap Hukum

Sebuah aturan hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila telah mengetahui, memahami dan menaati hukum tersebut. Hal ini berarti bahwa fungsi hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman benar-benar telah dirasakan.

5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Masalah peningkatan kesadaran hukum semestinya dilakukan melalui penyuluhan hukum secara teratur serta perencanaan yang mantap. Hal ini tentunya bertujuan untuk untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.¹¹

Kesadaran hukum adalah suatu kesadaran hukum yang ada dalam diri manusia untuk menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pelaksanaan Undang-undang No 45 tentang Perikanan pasal 18.

2) Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Pada awalnya istilah Nelayan hanya digunakan untuk menyebut orang yang menekuni pekerjaan menangkap Ikan di laut. Hal ini disebabkan karena dalam pekerjaan sebagai Nelayan masih bersifat seragam belum ada deferensiasi sosial. Nelayan secara umum diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya dari usaha menangkap ikan di

¹¹ H. Zainuddin Ali. Ibid

laut. Oleh sebab itu, masyarakat nelayan dapat dikatakan sebagai orang atau manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, yang sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan dan mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian pokok menangkap ikan serta hasil laut lainnya.¹²

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.¹³ Nelayan juga dapat diartikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan Ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.¹⁴

Lebih lanjut, nelayan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan bahwa nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.¹⁵

Defenisi diatas merupakan pengertian Nelayan secara umum. Dimana dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Nelayan adalah orang yang berprofesi sebagai penangkap Ikan atau segala jenis binatang air maupun tanaman air.

¹² Ahmadin. 2009. *Ketika Lautku Tak Berikan Lagi*, Makassar: Rayhan intermedia hal 23

¹³ 2010. *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. Bandung. Citra Umbara: Bandung. Hal 3

¹⁴ Arif Satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Pustaka Cidesindo Hal 26

¹⁵ 2010. *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. Bandung. Citra Umbara: Bandung. Hal 140

b. Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan

Nelayan dalam konteks kehidupan sosial masih sering digambarkan sebagai masyarakat terbelakang dan miskin. Kenyataan ini berdasarkan hasil penelitian dari Richad B. Pollnac bahwa komunitas nelayan di India termasuk kategori masyarakat yang berkasta rendah. Di Afrika orang Somalia menyerahkan kegiatan menangkap pada orang Midga dan kelompok masyarakat lainnya yang statusnya sosialnya dianggap rendah, termasuk di Mauratania yakni orang Imrauge yang status sosialnya rendah juga melakukan penangkapan ikan.¹⁶

Meskipun di Indonesia tidak ditemukan kasta dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi nelayan tetap merupakan komunitas yang sangat miskin dan umumnya lebih miskin dari keluarga petani dan pengrajin.¹⁷ Karenanya banyak nelayan yang menggunakan bom ikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini tentunya menggambarkan bagaimana kondisi sosial ekonomi nelayan.

Menurut Soerjono Soekanto kondisi sosial ekonomi adalah “Posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan keadaan penduduk disuatu daerah kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.”¹⁸

¹⁶ M. Michael Cernae. 1989. *Mengutamakan Manusia Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta; UI-Press. Hal 243.

¹⁷ Op cit. Ahmadin hal 2

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 21.

Kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat dilihat dari pekerjaan, pendidikan, maupun pendapatan. Menurut Krench “kehidupan sosial ekonomi seseorang atau keluarga diukur melalui pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan.” Sementara itu menurut Sugihen “kondisi ekonomi dan sosial seseorang cenderung menjadi rujukan dalam penentuan statusnya dalam masyarakat. Ukuran yang dipakai didasarkan pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendapatan, pendidikan, prestise dan kekuasaan”. Lebih lanjut, menurut Koetjananingrat selain factor pekerjaan, pendapatan dan pendidikan, faktor lain yang sering diikutsertakan oleh beberapa ahli lainnya adalah perumahan, kesehatan, dan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

Pendapat diatas, ketika dihubungkan dengan kehidupan nelayan yang notabenenya sebagai masyarakat pulau dengan letak daerah yang begitu terpencil maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang bagaimana penggambaran kehidupan sosial ekonomi nelayan tersebut. Diantaranya yaitu pendidikan, pendapatan dan kesehatan yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pada dasarnya setiap manusia yang diciptakan oleh yang Maha Pencipta telah dianugerahi akal berupa pikiran dan budi pekerti. Dimana dengan adanya akal manusia dapat berpikir secara rasional, dengan adanya budi pekerti manusia dapat berperilaku etis. Segala tindakan yang dilakukan manusia terhadap obyek tertentu, itu

berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Ada banyak cara yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan yaitu melalui pendidikan baik formal, informal maupun nonformal.

Pendidikan jika ditinjau dari sudut pandang yang luas diartikan sebagai suatu fenomena psikis manusia berupa dorongan belajar untuk mendapat pengetahuan baru dari segala jenis pengalaman dan pemikiran yang muncul di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupannya.¹⁹ Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih sempit pendidikan dipahami secara terbatas. Dari sudut pandang ini, pendidikan diartikan sebagai seluruh kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan secara teratur dan terarah. Hal ini berarti pendidikan tersebut dilakukan secara institusional di sekolah.²⁰

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi seorang muslim. Sebagaimana dalam ungkapan Rasulullah : *“tuntutlah ilmu walau kenegeri Cina”*. Hal ini menandakan betapa pentingnya pengetahuan itu karena bahkan Rasulullah menganjurkan untuk menuntut ilmu. Selain itu, Pengetahuan juga memberikan kemuliaan dihadapan Allah dan dihadapan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-mujadalah ayat 11 yang berarti:

” Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan

¹⁹ Suparlan Suhartono. 2010. *Pengantar Ilmu pendidikan*. UNM: Makassar. Hal 25

²⁰ Suparlan. *ibid*

untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, “berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.”²¹

Ayat diatas memuat janji Allah bagi orang yang berilmu dan beriman serta mengamalkan ilmunya di jalan Allah untuk ditinggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat.

Pendidikan yang dimaksud disini dalam kaitannya dengan nelayan di Kabupaten Pangkep mencakup pengetahuan nelayan akan bahaya penggunaan bom ikan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum, dalam hal ini kesadaran hukum dari nelayan tersebut yang tentu tidak hanya terbatas pada pendidikan formal.

2. Pendapatan

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik bagi Negara maupun dalam kehidupan berumah tangga jumlah pendapatan sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Tinggi rendahnya pendapatan akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam mengatur perilaku ekonomi masyarakat karena pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat.

3. Kondisi Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Karena rumah tempat beristirahat, terlindung dari bahaya dan juga sebagai lambang status sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh

²¹ Q.S Almujaadalah. Pusataka Al-Kautsar. Hal 543

Komaruddin bahwa, "rumah bagi manusia berfungsi sebagai tempat melepas lelah dan beristirahat, tempat berlindung dari bahaya, sebagai lambang status sosial serta penyimpanan dan peletakan barang-barang rumah tangga."²²

Sebagaimana yang dinyatakan diatas, rumah selain dari fungsi yang sebenarnya sebagai tempat beristirahat dan berlindung juga berfungsi untuk menunjukkan status sosial yang berarti bahwa kualitas perumahan akan mempengaruhi kualitas hidup pemiliknya.

Hal diatas tentunya juga berlaku dalam lingkungan hidup nelayan. Rumah bagi nelayan selain sebagai tempat bersitrahata, berlindung dan berkumpul dengan keluarganya juga merupakan alat untuk meningkatkan status sosial. Maka dari itu mereka akan berupaya untuk memperbaiki strata sosialnya melauai rumah tempat tinggalnya.

c. Karakteristik Masyarakat Nelayan

Karakateristik masyarakat nelayan berdasarkan kondisi sosial ekonomi dikelompokkan menjadi:

- a. Nelayan kaya yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain (juragan), tanpa harus ikut bekerja.
- b. Nelayan kaya yang memiliki kapal, tetapi ikut bekerja sebagai awak kapal, tetapi ikut bekerja sebagai awak kapal.
- c. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan.

²²Nur Isnaini. 2009. *Sosial Ekonomi Masyarakat Pedagang Waduk Gajah Mungkur (Study kasus tentang kehidupan sosial ekonomi pedagang sector informal di kawasan wisata waduk Gajah Mungkur Wonogiri)*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Hal 29

- d. Nelayan miskin yang berpendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan pekerjaan lain dan harus melibatkan istri dan anak-anaknya.
- e. Nelayan pendega atau tukang kiteng.²³

d. Klasifikasi Nelayan

Dalam perkembangan zaman, ketika modernisasi telah menyentuh sektor perikanan yaitu dengan adanya penggunaan mesin pada perahu dan alat tangkap yang modern maka penyebutan terhadap Nelayanpun mulai bervariasi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penamaan Nelayan tersebut maka dilakukan pengklasifikasian.

Berikut beberapa pengelompokan Nelayan yaitu:

1) Nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan dan pemeliharaan.

Hal ini merujuk pada formulasi Ditjen perikanan yang menklasifikasikan nelayan sebagai berikut:

- a. Nelayan/petani ikan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- b. Nelayan/petani ikan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan yakni operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- c. Nelayan/petani ikan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.²⁴

²³Ahmadin. Op. Cit hal. 49

²⁴ Ahmadin. Ibid Hal 51

2) Nelayan berdasarkan aspek kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi dan karakteristik hubungan produksi.

Nelayan jenis ini dapat digolongkan kedalam 3 macam yakni:

- a. *Peasant fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri.
- b. *Post peasant fisher*, yakni nelayan bercirikan menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor.
- c. *Commercial fisher*, yakni nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya telah besar yang dicirikan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda.²⁵

3) Nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan.

Nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Nelayan Pasulo
- b. Nelayan papekang atau pammeng
- c. Nelayan Buhu
- d. Nelayan Papuka.²⁶

e. Jenis-jenis Alat Tangkap

Secara mendasar metode penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia dilakukan dengan cara yang berbeda. Setiap daerah memiliki metode yang berbeda dan biasanya memiliki ciri khas tertentu. Akan tetapi, ada juga yang memiliki kesamaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu

²⁵Ahmadin. Ibid Hal 52

²⁶Ahmadin. Ibid Hal 41.

kondisi lingkungan laut, spesies Ikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Alat tangkap yang umumnya digunakan oleh Nelayan berikut dengan jenis nelayan tersebut yaitu:

- 1) *Pasulo* yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa *poke* atau *bessi* (tombak), lampu *strongkeng* dengan bahan bakar dari minyak tanah dan tempat menampung ikan hasil tangkapan yang disebut *langka*.
- 2) *Papekang* atau *Pammeng* (pengguna pancing) dikelompokkan kedalam dua golongan yakni menggunakan perahu layar dan yang tidak memakai perahu. Nelayan yang tidak menggunakan perahu tersebut hanya melakukan penangkapan ikan terbatas di pinggir pantai dengan satu mata pancing saja, sedangkan bagi mereka yang memakai perahu layar otomatis wilayah tangkapan sedikit lebih luas yang dilengkapi lebih dari satu.
- 3) *Buhu* (*bubu*) sebagai alat tangkap. Jenis alat tangkap ini menyerupai perangkap mini (karena ukurannya kecil), dan pengoperasiaannya dilakukan dengan memasang dilaut pada waktu malam hari.
- 4) *Papuka* yakni menggunakan alat tangkap berupa pukat yang panjang ukurannya tidak ditentukan (didasarkan pada kebutuhan masing-masing).²⁷

Keempat jenis alat tangkap ini sedikit banyak telah mengalami pergeseran pada peralatannya. Seperti pada *Pasulo*, penggunaan lampu *Strongkeng* telah diganti menjadi ginset dan tempat menampung ikan (*langka*) biasanya nelayan menggunakan ember. Kemudian untuk penggunaan layar pada perahu diganti menjadi mesin.

²⁷Ahmadin. Loc. Cit Hal 41.

3) Penggunaan Bom Ikan (*blast fishing*)

a. Pengertian Bom Ikan

Pemboman ikan merupakan salah satu *Destructive Fishing* yaitu kegiatan yang praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumber daya perikanan yang tentunya hal ini secara yuridis melanggar hukum. Pada dasarnya bom ikan adalah sebuah upaya penangkapan ikan, umumnya ikan permukaan (pelagis) yang menjadi incaran yang dilakukan oleh tentara Jepang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para tentara dan penduduk lokal bertindak sebagai pemungut ikan.

Penduduk pribumi yang pada mulanya hanya sebagai pemungut ikan mulai belajar merakit dan memperaktekkan bahkan melakukan modifikasi terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan metode ini. Metode penangkapan ikan dengan cara mengebom terbilang praktis yaitu dengan penggunaan Kalium Nitrat atau sejenis dengan pupuk yang akan menghasilkan ledakan yang besar dengan hasil yang memuaskan. Sehingga metode ini masih populer sampai sekarang di kalangan nelayan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus nelayan mengalami kecelakaan pada waktu melakukan pemboman ikan. Tak jarang ada nelayan yang sampai mengalami cacat bahkan sampai meninggal dunia dikarenakan penggunaan bom ikan tersebut.

Selanjutnya penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan

peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang²⁸.

Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bom ikan tidak hanya sampai disitu, saat ini nelayan mulai sulit untuk memperoleh ikan karena rusaknya terumbu karang yang merupakan habitat dari ikan dan binatang air lainnya. Adapun yang dimaksud dengan bom ikan adalah (1) bahan yang dapat meledak atau menyebabkan ledakan, (2) senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat yang menghasilkan sejumlah besar gas bertekanan tinggi.

²⁸ Jurnal pencemaran laut hal 2

b. Dasar Hukum

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan selain merupakan tindakan merusak ekosistem laut juga merupakan tindakan melanggar hukum. Dimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (PERDA) pasal 24 (a) yaitu;

Setiap orang atau badan hukum dilarang (a) melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.²⁹

Selanjutnya Pasal 24 (a) kemudian dipertegas dengan adanya sangsi dalam pasal 25 ayat 3 apabila terjadi pelanggaran yaitu:

(2) pelanggaran atas ketentuan pasal 13, pasal 14 dan pasal 24 peraturan daerah ini diancam pidana dan atau denda sesuai dengan undang-undangan yang berlaku.

Pelarangan terhadap penggunaan bom ikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 35 bagian c yaitu:

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

Lebih lanjut, upaya penangkapan ikan dengan cara penggunaan bom ikan atau bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini secara spesifik diatur dalam

²⁹ PERDA Sul-Sel Nomor 06 Tahun 1996 tentang izin usaha perikanan.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidaya ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perikanan Republik Indonesia.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk menangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemerintah.³⁰

³⁰2010. *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. Bandung. Citra Umbara: Bandung. Hal 70

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, penggunaan Bom Ikan atau bahan peledak dilarang tidak hanya dari segi perorangan melainkan semua jenis usaha yang dapat merusak lingkungan. Pelanggaran akan hal tersebut diatas tentunya akan menuai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sebagaimana yang tercantum dalam bab XV ketentuan pidana pasal 84 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yaitu:

- (1) Setiap orang yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta).
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelsetarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³¹

Sebagaimana yang telah diuraikan isi dari Undang-undang diatas, aturan maupun sanksi mengenai penggunaan bom ikan sangat jelas. Akan tetapi, tetap masih banyak masyarakat nelayan yang menggunakan bom ikan tersebut.

c. Alat, Bahan dan Cara Perakitan Bom Ikan

Teknik merakit bom ikan pada dasarnya sangatlah sederhana tanpa membutuhkan keahlian khusus sehingga masyarakat banyak yang tertarik untuk membuat bahan peledak ini. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, teknik perakitan bom ikan juga mengalami perkembangan.

1. Awalnya masyarakat menggunakan wadah buah kelapa. Setelah menggunakan wadah buah kelapa, lalu berubah menggunakan wadah botol bekas minuman ringan, antara lain botol minuman kratingdaeng. Modifikasi inidilakukan karena proses pekerjaan dengan menggunakan wadah buah kelapa sangat lama dan rumit, dimana batok kelapa tersebut harus dalam keadaan kering dan isi dalam kelapa harus benar-benar habis dikerok dan dikelurkan. Menurut masyarakat pekerjaan

³¹ UU Perikanan Nomor 45 tahun 2009. Ibid. Bab XV Hal 99

ini dapat mencapai 3-4 hari sampai wadah buah kelapa ini benar-benar siap untuk digunakan sebagai bom.

2. Proses perakitan dari kelapa Menggunakan botol bekas minuman ringan tidak mengalami banyak perubahan. Hanya saja pada alat ini dibutuhkan sedikit pemberat dimana untuk mencapai sasaran tangkapan maka wadah ini harus tenggelam, maka diharapkan dalam wadah ini ditambahkan sedikit pasir. Tapi perkembangan demi perkembangan wadah pemberat ini mengalami perubahan pula dari pasir menjadi garam. Perbedaan fungsi kedua bahan tersebut yakni pada bahan pasir hanya berfungsi sebagai pemberat saja sedangkan bahan dengan menggunakan garam memiliki multi fungsi di samping sebagai pemberat juga berfungsi sebagai penambah ledakan.
3. Menggunakan pupuk urea yang marak diperjualbelikan di pasaran dalam negeri. Jenis pupuk ini sebelum dimanfaatkan terlebih dahulu mengalami modifikasi yakni masyarakat melakukan aktifitas penggorengan untuk mendapatkan pupuk yang daya ledak hampir sama dengan pupuk yang dari luar negeri. Menurut sumber jika tidak digoreng, maka pupuk tersebut tidak mengakibatkan daya ledak yang tinggi.³²

Bahan-Bahan yang diperlukan dalam melakukan suatu aktifitas pengeboman adalah pupuk, atau bekas bom/mesiu yang sudah tidak terpakai, detonator, kompresor dan balok-balok es ,sebagai pendingin menyimpan ikan.³³

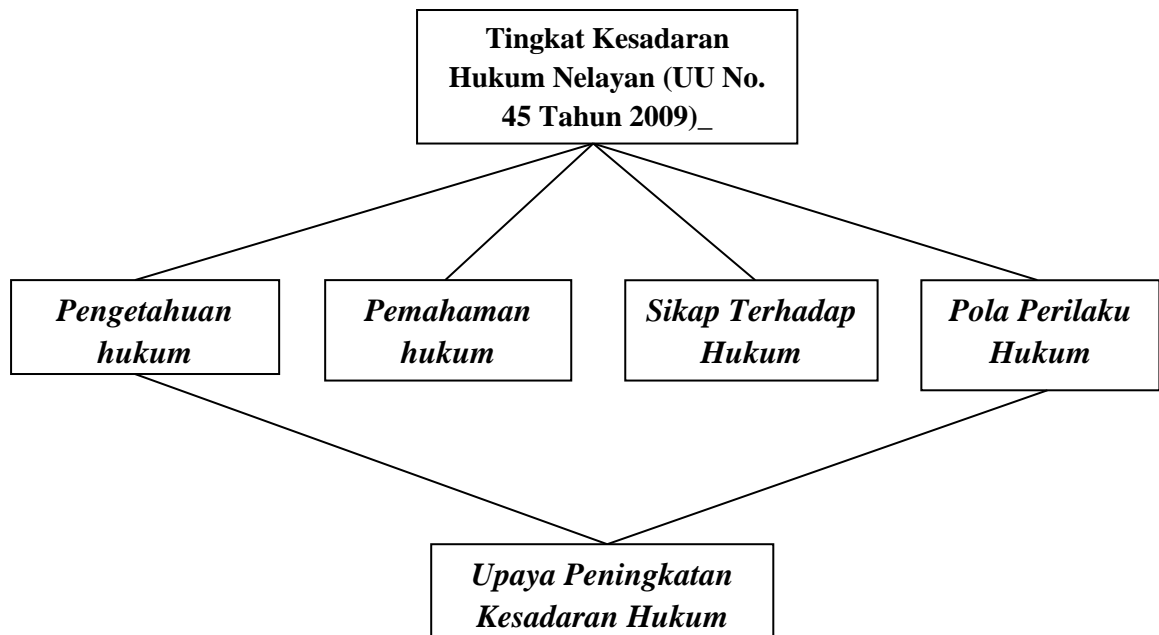
B. KERANGKA PIKIR

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah mengerti, tahu, memahami, melaksanakan suatu aturan yang telah dibuat secara ikhlas dan betul-betul berasal dari hati nurani seseorang dalam hal ini terkhusus bagi nelayan sebagai objek peneliti. Membahas masalah kesadaran hukum Nelayan, tentunya tidak terlepas dari sebuah aturan hukum yang dijadikan sebagai acuan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

³²[http://www. Cara merakit bom ikan.co.id](http://www.Cara%20merakit%20bom%20ikan.co.id). tgl 28-10-2014

³³[http://www. Cara merakit bom ikan.co.id](http://www.Cara%20merakit%20bom%20ikan.co.id). Ibid.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Nelayan dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal menggunakan indikator 1. Pengetahuan hukum, 2. Pemahaman hukum, 3. Sikap terhadap hukum, 4. Pola perilaku hukum. Sedangkan faktor eksternal dilihat dari kehidupan Nelayan masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan terutama di era modernisasi sekarang ini. Kebutuhan hidup semakin meningkat sementara pendapatan dari melaut tidak pernah meningkat malah semakin berkurang. Selain itu, keadaan sosial yang semakin dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat juga mendorong nelayan untuk berupaya meningkatkan pendapatannya. Inilah yang menjadi faktor penyebab mengapa nelayan menggunakan bom ikan. Dari permasalahan tersebut tentu dibutuhkan sebuah upaya, baik dari Nelayan itu sendiri maupun dari lembaga pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel secara sederhana adalah sebagai ciri dari individu. Gejala maupun objek yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu “Kesadaran Hukum Nelayan dan Penggunaan Bom Ikan”.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan tentang Analisis tentang Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Nelayan terhadap Penggunaan Bom Ikan sesuai dengan rekaman data penelitian tentang obyek yang diteliti kemudian ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah-istilah tersebut, diantaranya:

1. Kesadaran Hukum adalah suatu keadaan dimana nelayan di desa mattiro kanja mengetahui, mematuhi untuk melaksanakan aturan hukum yang berlaku di Desa mattiro kanja Kabupaten Pangkep yaitu Undang-Undang Nomor 45 tentang perikanan Tahun 2009 pasal 8 dan pasal 84, dengan

indikator kesadaran hukum yaitu pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

2. Penggunaan Bom Ikan adalah kegiatan menangkap ikan oleh nelayan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang dapat merusak ekosistem laut.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua nelayan yang bertempat tinggal di Desa Mattiro Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep. Karena letak daerah ini adalah kepulauan maka hampir semua penduduk berprofesi sebagai nelayan. jumlah nelayan di Desa mattiro kanja sebanyak 280 nelayan.

Tabel 3.1 Keadaan Nelayan Di Desa Mattiro Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep.

NO.	DUSUN	JUMLAH NELAYAN
1.	Dusun Utara	134
2.	Dusun Selatan	146
JUMLAH		280

(sumber : Kantor Kepala Desa Mattiro Kanja Kec. Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep)

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang ditetapkan dengan purposive sampling dengan kriteria informan atau sampel adalah sebagai berikut :

- a. Nelayan yang telah menekuni profesinya telah bekerja selama atau lebih 5 tahun
- b. Bertempat tinggal tetap di Desa Mattiro Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep
- c. Sudah berkeluarga.

Sampel ini diambil secara selektif dari tiap-tiap RT dimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keadaan Sampel Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep

[illegible]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat nelayan di Desa Mattiro Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara ini ditujukan kepada nelayan didesa mattiro kanja dengan tujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dikaji.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data dokumentasi berupa data tertulis tentang keadaan penduduk dan keadaan geografis desa mattiro kanja.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis presentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dengan menggunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Dimana: P = persentase

f = frekuensi jawaban

N = jumlah sampel.³⁴

Kemudian melakukan penarikan Kesimpulan secara kualitatif.

³⁴ Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan* . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau biasa disingkat Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah tiga dimensi karena wilayah pangkep meliputi pegunungan, dataran rendah dan kepulauan dengan karakteristik dan ciri bahari dimana kawasan kepulauannya terletak di perairan Selat Makassar yang merupakan salah satu wilayah penyebaran terumbu karang.

Secara administratif, Kabupaten Pangkep terbagi atas 9 kecamatan masing-masing wilayah terdiri dari (5) lima kecamatan dataran rendah, (1) satu kecamatan pegunungan dan (4) empat kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Liukang Kalukuang Massalimu (Kalmas), Kecamatan Liukang Tangayya, Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Fokus penelitian dalam studi ini adalah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara yang terpilih menjadi sampel yaitu Desa Mattiro Kanja.

a. Letak Geografis

Kecamatan Liukang Tupabbirng Utara merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Pangkep yang memiliki dinamika tinggi dalam berbagai aspek sosial ekonomi dibanding kecamatan lainnya dan merupakan bagian dari

gugusan kepulauan spermonde. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 74,00 km². (Sumber: BPS Makassar)

Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara merupakan kecamatan yang baru terbentuk. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara awalnya gabungan dari Kecamatan Liukang Tupabbiring yang kemudian Kecamatan ini di bagi menjadi dua dan Desa Mattiro Kanja ditetapkan sebagai ibu kota kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Mattiro Kanja terletak pada posisi Koordinat geografis -4,7500 119,4328 4° 45' 0.000" Lintang Selatan dan 119° 25' 58.000" Bujur Timur. (Sumber: BPS Makassar). Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Desa Mattiro Bombang,
2. sebelah Selatan Desa Mattiro Ulung,
3. sebelah Barat Desa Mattiro Walie dan
4. sebelah Timur Desa Mattiro Baji.

b. Keadaan Fisiografis

Keadaan topografi Desa Mattiro Kanja merupakan dataran rendah dengan hutan dan semak pada bagian tengah pulau. Pulau ini terbentuk dari sedimen atau pengendapan material dasar laut yang kemudian membentuk karang dan timbul kepermukaan, hingga menjadi sebuah daratan dengan kemiringan lereng 0-3% dengan morfologi pantai berpasir³⁵.

³⁵ Kantor Badan Pusat Statistik Makassar

c. Sumber Daya Alam

Wilayah perairan Kabupaten Pangkep terbentang terumbu karang seluas 37.000 hektar tempat dimana ikan berkembang biak. Berdasarkan data terakhir yang dikumpulkan, kondisi terumbu karang diperkirakan sudah mengalami kerusakan berat mencapai 60%³⁶, seperti dapat terlihat di sekitar kepulauan spermonde, termasuk Kecamatan Liukang Tupabbiring.

Kerusakan terumbu karang menyebabkan hilangnya tempat hidup berbagai biota laut termasuk ikan, hal ini tentu berdampak bagi penduduk kepulauan karena turunnya kuantitas hasil tangkapan nelayan khususnya di wilayah spermonde. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI-*Coral Reef Rehabilitation and Managemen Program* (COREMAP) bertujuan untuk memperbaiki dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah dan mulai rusak, kondisi tutupan karang yang hidup diperairan Kabupaten Pangkep khususnya kepulauan Spermonde mencapai 31,30% dengan mayoritas jenis non arcopora.

d. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian, penduduk Desa Mattiro Kanja yang tersebar dalam 8 dusun memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan data yang diperoleh, Jumlah penduduk Desa Mattiro Kanja pada tahun 2014 sebanyak 1621 jiwa dengan 399 Kepala keluarga dimana mayoritas dari penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

³⁶<http://www.jurnalcelebes.com/view.php?id.> Tgl 10-12-2014

Tabel 4.1 Distribusi Penduduk Per Dusun Menurut Jenis Kelamin Di Desa
Mattiro Kanja

Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	Kepala Keluarga
Utara	363	382	745	193
Selatan	440	436	876	206
Jumlah	803	818	1621	399

Sumber : (Kantor Desa Mattiro Kanja Kec. Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep)

Dilihat dari kualitas penduduk yaitu dari segi pendidikan, rata-rata nelayan yang ada di Desa Mattiro Kanja mengeyam pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar, hanya sebagian kecil yang menyelesaikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Rata-rata penduduk di Desa Mattiro Kanja merupakan nelayan tangkap dimana hasil tangkapan mereka seperti:

1. Pepetek, biasanya mereka menjual perbak dengan harga Rp.50.000 - Rp.-60.000 langsung kepasar
2. Kepiting, Rp.-25.000 - Rp.-30.000/kg harga yang biasa dibayar kepenampung
3. Cumi-cumi, Rp.-30.000 - Rp.-45.000/kg.

Untuk armada yang digunakan yaitu, Perahu motor 24PK, Perahu Dayung dan perahu Katinting yang biasa digunakan untuk mencari cumi-cumi. Alat tangkap yang biasa digunakan yaitu jaring kepiting, pukat dan alat pancing cumi-cumi.

Desa Mattiro Kanja dapat dicapai dengan menggunakan perahu bermotor dalam waktu ± 2 jam jika melalui pelabuhan pangkep yang berlokasi di dekat pasar central pangkep dengan tarif Rp. 15.000/orang. Kapal yang beroperasi di Sungai ini sebanyak 3 buah dalam kurun waktu 7 hari dalam seminggu, sedang waktu kapal beroperasi dimulai pada pukul 09.00 WITA sampai jam 11.00 WITA. Selain dari pelabuhan Pangkep, Desa ini juga dapat dijangkau melalui dermaga Maccini Baji dengan waktu tempuh ± 30 menit.

e. Sarana Dan Prasarana Sosial Ekonomi

Sarana dan prasarana sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu perlu diuraikan sedikit tentang sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Mattiro Kanja yaitu:

1. Sarana Pendidikan

Di Pulau ini, sarana pendidikan terbilang memadai mulai dari tingkat PAUD, SD, MTS, MA dan SMAN.

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di desa mattiro kanja yaitu PUSKESMAS dengan beberapa tenaga medis seperti Perawat, Bidan, dan Dokter. Namun tim

medis ini tinggal di luar pulau jadi hanya datang ke pulau pada jam kerja saja.

3. Sarana Penerangan

Terdapat dua sumber penerangan di Pulau ini yaitu PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dimana keduanya dikelola oleh PT. PLN (PERSERO).

4. Sarana Air bersih

Untuk kebutuhan akan air bersih, di pulau ini cukup memadai. Terdapat sumur-sumur bor di tiap rumah warga yang airnya tawar.

5. Sarana Ibadah

Rata-rata penduduk di Pulau ini beragama Islam maka sarana ibadah yang ada yaitu satu Masjid besar di bagian Utara dan satu Mushollah di bagian Selatan.

6. Sarana jalan

Pulau ini telah dilengkapi dengan jalan berupa paving block yang lebarnya tiga meter mengelilingi pulau, dan jalan setapak dua meter hingga masuk ketengah Pulau.

7. Sarana Ekonomi

Secara umum, fasilitas ekonomi di Kabupaten Pangkep seperti pasar tradisional tersebar di tiap kecamatan kecuali empat kecamatan Kepulauan. Hal ini disebabkan karena letak dari pulau tersebut yang jauh dari daratan. Bagi penduduk yang tinggal di kepulauan sarana ekonomi yang tersedia hanyalah warung-warung kecil yang

menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi yang terdapat di Desa Mattiro Kanja yaitu, Koperasi Nelayan yang sudah tidak berfungsi lagi.

2) Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja

Kesadaran hukum sebagaimana menurut Baharuddin Lopa adalah “adanya anggota-anggota masyarakat mematuhi hukum karena keikhlasannya, karena mereka merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.” Artinya bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang lahir dalam diri seseorang. Kesadaran hukum seseorang perlu untuk diketahui karena kesadaran hukum merupakan asas pembangunan Nasional. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dari kesadaran hukum adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum seseorang, apakah rendah atau tidak kemudian melihat faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Keadaan Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep

No	Indikator Kesadaran Hukum	Persentase %	Keterangan
1	Pengetahuan Hukum	78,12%	Tinggi
2	Pemahaman Hukum	31,25%	Rendah
3	Sikap Hukum	40,62%	Rendah
4	Pola perilaku hukum	46,87%	Rendah

Sumber: Berdasarkan Hasil Analisis Faktor-Faktor Kesadaran Hukum Nelayan

Tabel 4.2 menunjukkan tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep. Pengetahuan Nelayan tergolong tinggi yaitu 78,12%, Pemahaman hukum rendah yaitu 31,25%, Sikap hukum rendah yaitu sekitar 40,62%, dan pola perilaku hukum rendah 46,87%. Dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan Bom Ikan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep tergolong rendah.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan

Peneliti membagi kedalam dua faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan di Kabupaten Pangkep yaitu faktor internal (dari dalam individu) dan faktor eksternal (faktor dari luar artinya yang terjadi dilingkungan masyarakat Nelayan).

Penelitian akan kesadaran hukum ini dari segi internal berpatokan pada indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu 1) Pengetahuan Hukum, 2) Pemahaman Hukum, 3) Sikap Hukum, 4) Pola Perilaku Hukum. Sedangkan dari segi eksternal dilihat dari Kondisi Ekonomi Nelayan, dan kurangnya kerjasama antara Nelayan dengan pemerintah.

Hal tersebut dapat menunjukkan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan terhadap penggunaan bom ikan serta upaya yang mesti dilakukan. Berikut penjelasannya:

a. Faktor Internal

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berarti seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis, Pengetahuan tersebut meyangkut pengetahuan yang dilarang oleh hukum maupun yang dibolehkan oleh hukum.

Dalam penelitian ini, pengetahuan hukum yang dimaksud adalah sejauh mana nelayan memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan penggunaan pemboman ikan. Untuk melihat permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Mengenai Hukum

Kategori	Frekuensi	
	Absolut	Relatif
Tahu	25	78,12
Tidak tahu	7	21,87
Jumlah	32	100%

Sumber: hasil wawancara 2015

Dari tabel 4.3 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 78,12% nelayan memiliki pengetahuan tentang larangan penggunaan bom Ikan, 21,87% Nelayan tidak tahu tentang adanya aturan tersebut. Dari data ini, dapat diperoleh pengetahuan responden mengenai masalah pengetahuan hukum tentang penggunaan bom ikan untuk lebih menjelaskan data diatas, maka dapat diuraikan berdasarkan hasil wawancara dari salah satu responden sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara dengan Abdurrahman selaku anggota COREMAP menyatakan:

“yang kita ketahui kalau penggunaan bom ikan itu dilarang yang biasa menjatuhkan pasal-pasal hanya pihak berwenang yaitu polisi, penegak hukum.”³⁷

³⁷ Abdurrahman, wawancara tanggal 18 januari 2015

Lebih lanjut dikatakan oleh Dg. Lewa dan Bakhtiar yang menyatakan:

“yaro ma’bareccunge laranganna metto pamarentah yaro, engka ilalenna undang-undange makkeda yaro ma’bareccunge ilarangi, I tikkeng ki ku I po gau i.”³⁸

Artinya,

menggunakan bom ikan memang merupakan larangan dari pemerintah, terdapat dalam Undang-undang bahwa menggunakan bom ikan dilarang, kita akan ditangkap jika melakukan hal tersebut.

Keterangan dari 3 responden tersebut memberikan gambaran bahwa Nelayan mengetahui aturan atau hukum tentang pelarangan penggunaan bom ikan yang terdapat dalam Undang-Undang. Pengetahuan hukum menjadi sangat penting dalam pelaksanaan sebuah aturan agar hukum tersebut berjalan sesuai tujuannya. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas lagi pengetahuan nelayan maka dapat dilihat pendapat responden berikut.

Menurut Bakri menyatakan bahwa :

“saya sebagai nelayan Alhamdulillah tidak pernah menggunakan bom ikan karena saya tahu hal tersebut selain sebagai larangan juga dapat menyebabkan cacat, bahkan sampai meninggal dunia. Memang saya akui bahwa hasil tangkapan dari menggunakan bom ikan lebih banyak daripada yang tidak menggunakan. Akan tetapi, itu juga tergantung dari rejeki seseorang.”³⁹

Berdasarkan keterangan dari Bakri menunjukkan bahwa Nelayan di Desa Mattiro Kanja tidak menggunakan Bom Ikan, mereka memiliki pengetahuan hukum. Lebih lanjut, Menurut Hamid:

³⁸ Dg. Lewa dan Bakhtiar, wawancara tanggal 24 Januari 2015

³⁹ Bakri, wawancara tanggal 4 Februari 2015

*“de’ma engka ku mappake bareccung, apa’ wisseng makkeda ilarang tapi ko Undang-undangna de’ wissengi. nappa maega makku koe tau jamai tau pole Pulau Karanrang biasana.”*⁴⁰

Artinya,

saya tidak pernah menggunakan bom ikan karena saya tahu itu dilarang, tapi saya tidak tahu undang-undangnya. Sekarang, sudah banyak orang yang menggunakan bahan peledak tersebut biasanya dari pulau Karanrang.

Berdasarkan hasil uraian diatas, Pengetahuan hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep memberikan suatu gambaran bahwasanya Nelayan sudah tahu bahwa ada aturan atau ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelarangan penggunaan Bom Ikan.

2. Pemahaman Tentang Isi Aturan-Aturan Hukum

Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan Nelayan mengenai isi dari aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 8. Permasalahan tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pemahaman Nelayan Tentang Isi Undang-Undang Perikanan Pasal 8 Nomor 45 Tahun 2009

Kategori	Frekuensi	
	Absolut	Relatif
Paham	10	31,25
Tidak paham	22	68,75
Jumlah	32	100%

Sumber: hasil wawancara 2015

⁴⁰ Hamid, wawancara tanggal 20 januari 2015

Berdasarkan tabel 4.4 dapat menunjukkan bahwa sebanyak 31,25% nelayan paham mengenai aturan penggunaan bom ikan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 8. 68,75% Nelayan tidak paham isi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 8. Data diatas di dukung oleh beberapa pernyataan sebagai berikut.

Menurut Dg. Tappu': *"de'wissengi undang-undang nak jadi pattega i carana elo' u pahami maksudna, se'di bawang makkeda nalarang pamarentah."*⁴¹

Artinya,

saya tidak tahu undang-undangnya. Jadi bagaimana cara saya bisa memahami maksud dari undang-undang tersebut. Satu pemahaman saya bahwa hal tersebut dilarang oleh pemerintah.

Secara umum, Nelayan telah mengetahui dan memahami bahwa penggunaan bom Ikan merupakan perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, pemahaman yang di maksud oleh peneliti disini adalah apakah Nelayan secara spesifik memahami isi dari Undang-undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 pasal 8 serta sanksi yang harus diterapkan yaitu terdapat pada pasal 84.

Senada dengan Dg. Tappu', idrus juga menyatakan:

*"Undang-undang perikanan de'na engka wengkalinga. De' upahangngi aga ilalenna. Engka pura biasa adakan sosialisasi, anumi na poakki makkeda ko mappakeki bareccung, bius, pukat harimau nasolangi batu karang e'."*⁴²

⁴¹ Dg. Tappu', wawancara tanggal 20 januari 2015

⁴² Idrus, wawancara tanggal 27 januari 2015

Artinya,

Undang-undang perikanan saya tidak pernah dengar, saya tidak paham mengenai undang-undang tersebut. Pemerintah pernah melakukan sosialisasi, tapi hanya membahas bahwa penggunaan bom ikan, bius dan pukat harimau dapat merusak batu karang.

Hasil wawancara diatas, menunjukkan tentang bagaimana pemahaman hukum Nelayan tentang Undang-Undang Perikanan. Nelayan belum memahami maksud dan tujuan mengapa penggunaan bom ikan dilarang dan secara khusus nelayan belum memahami secara spesifik aturan hukum pelarangan penggunaan bom ikan yang mereka tahu hanyalah menggunakan bom ikan dilarang oleh pemerintah.

3. Sikap terhadap aturan hukum

Sikap terhadap aturan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap aturan penggunaan bom ikan. Hal ini juga didukung berdasarkan data tentang bagaimana sikap nelayan mengenai peraturan penggunaan bom ikan berdasarkan tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Sikap Nelayan Terhadap Aturan Penggunaan Bom Ikan

Kategori	Frekuensi	
	Absolut	Relatif
Sepakat	13	40,62
Tidak Sepakat	19	59.37
Jumlah	32	100%

Sumber: Hasil Wawancara 2015

Tabel 4.5 Diatas menunjukkan sikap Nelayan terhadap peraturan penggunaan bom ikan. Data menunjukkan 40,62% sepakat terhadap aturan tentang penggunaan bom Ikan, 59,37% Nelayan tidak sepakat terhadap aturan tersebut. Lebih lanjut, data ini diperjelas berdasarkan tanggapan beberapa responden.

Tanggapan Dg. Muji terhadap peraturan penggunaan Bom Ikan adalah:

*"ia silaku masyarakat nelayan tentu setuju ladde'ka ko aturan na e'bbu' e pamarentah apalagi yae aturangnge tentang pa' bareccung, pa'bius apalagi yaro pukat harimau e'. tapi yanaro watanna idi apa isseng yaro aturanna tapi pelaksanaan na mawatang. Apa' biasa ko engka I runtu tentu I pisangkai, ipowangngi makkeda bela-belaki. Ko engka iruntu I lapor i'. Cuma, de'na' elo' manu tawwe' wae'. apa' idi' de'gaga pegangan pole Kepolisian. Jadi lebih membahayakan mi idi'. Idi'mi malah kasi' di anu toh nasa'ba' de'gaga Kepolisian sanrekiki. Idi' silaku-laku mappisangka kemudian idi' matu sianu yaro pa'bbonge'."*⁴³

Artinya,

saya selaku masyarakat nelayan tentu sangat setuju terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah apalagi aturan yang menyangkut pemboman ikan, bius dan pukat harimau. Tapi, hal ini sangat sulit karena meskipun tahu aturan tersebut tapi pelaksanaan yang sulit. Karena kadang ketika saya mendapati pembom pasti ditegur, bahwa anda harus jauh dari lokasi ini. Akan tetapi, hanya sebatas itu yang bisa dilakukan karena saya tidak punya pegangan di kepolisian malah lebih membahayakan diri sendiri. Kita yang setengah mati melapor malah kita yang kena imbasnya.

Berdasarkan keterangan Dg. Muji diatas, menjelaskan sikap hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja. Nelayan sepakat akan adanya aturan hukum tersebut. Namun, dari segi aplikatif masih ada faktor yang menghambat. Faktor yang penghambat nelayan menyikapi hukum

⁴³ Dg. Muji, wawancara tanggal 3 februari 2015

pelarangan penggunaan bom ikan dipengaruhi oleh Nelayan takut akan rusaknya hubungan tali silaturahmi, Nelayan takut pelaku akan balas dendam apabila di laporkan karena hal tersebut tidak akan ditindak lanjuti dan kurangnya kerjasama antara Nelayan dengan aparat untuk menanggulangi pelaku penggunaan bom ikan.

Senada dengan apa yang dituturkan Dg. Muji, Abd. Muin juga mengatakan demikian sebagaimana menurut hasil wawancara sebagai berikut:

Biasiki' mita' tau ma'bareccung ku laoki Mammeng Cumi'? "ba' biasaka" agaro ki pegau nakku I ritai? "Tentu I powangi makkeda aja' mukkotu' apa' lari cumi e', na Mammeng cumi ki mai he'." Kirisseng Makkeda Gau Larengeng? "ba', manessa. Bom gau larengeng apa' nasolangi batu e', nasolangi bale' apa' sininna ro bibi-bibi e' matemaneng." Biasana ko engka ki runtu' I lapor i? "ai mawatang wae nak, pa' nasaba' yaro pa'bonge' lari lao manorangi petugas e' lari lao maniang. Nattungka-tungka metto petugas e' massalangngingi jadi mawatang. Yammi bawang I powangi makkeda aja' mukkotu ma'bareccung apa' mammeng ki."44

Artinya,

apakah bapak sering melihat pembom ikan ? “ya, sering” apa yang Bapak lakukan ketika melihatnya? “tentu saya menegur dan mengatakan jangan di tempat ini karena saya memancing cumi, cumi akan lari.” Apakah bapak tahu bahwa hal tersebut merupakan tindakan terlarang? “yah, jelas, Bom merupakan tindakan yang dilarang karena merusak batu/karang, merusak ikan karena seluruh bibit-bibit ikan semuanya akan mati.” Apakah bapak melapor? “ai, susah nak, karena pembom ikan akan lari ke Utara sedang petugas lari ke Selatan. Petugas seperti sengaja untuk menghindar jadi susah. Yang bisa dikatakan hanyalah harap jauh-jauh jangan disini karena kita sedang memancing cumi.

⁴⁴ Abd. Muin, wawancara tanggal 30 januari 2015

Kurangnya kerjasama, sangat mempengaruhi sikap hukum Nelayan. Nelayan terkesan egois di karenakan nelayan takut dan merasa percuma melakukan tindakan hukum karena tidak adanya perlindungan hukum.

Mengenai tanggapan masyarakat dalam suatu peraturan pasti mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, terkadang ada yang sepakat terhadap aturan tersebut tetapi tidak mengetahui dan memahami aturan tersebut, yang dijadikan sebagai tolak ukur biasanya hasil atau manfaat dari aturan tersebut apakah dapat dirasakan atau tidak sehingga sikap masyarakat terhadap aturan tersebut beraneka ragam.

Sebagaimana menurut Semmaila:

“Ko masalah situjukki, manessa ni ro situju ta’. Tapi ko elo’ yamparang, ye’bukang mi jamang-jamang aleta’. Le’bbirang pada I jamai jamatta’”.⁴⁵

Artinya,

Ketika berbicara masalah sepakat, tentu saya sepakat akan adanya undang-undang. Tapi, ketika ingin ditegur itu hanya menambah pekerjaan baru. Lebih baik mengerjakan pekerjaan masing-masing.

Lebih lanjut, menurut Hasan:

“percumami engka larangeng, de’to na engka ittikkengi. Asengmi yaro larangeng e’”.⁴⁶

Artinya,

⁴⁵ Semmaila, wawancara tanggal 19 februari 2015

⁴⁶ Wawancara Hasan 20 Februari 2015

“percuma ada larangan. Pelaku tidak pernah ditangkap, itu hanya sekedar larangan.”

Pendapat diatas, dianggap telah mewakili pendapat 32 responden lain. Peneliti hanya mengambil 4 responden karena apa yang diutarakan oleh responden lain semuanya sama. Keempat pendapat tersebut menggambarkan sikap nelayan terhadap aturan-aturan hukum mengenai penggunaan bom ikan, bahwa nelayan setuju tentang adanya undang-undang perikanan, tapi dalam menindak lanjuti aturan hukum yang berlaku nelayan memiliki beberapa alasan tertentu. Inilah yang menjadi suatu permasalahan didalam penerapan suatu aturan hukum.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum yang dimaksud yaitu seseorang yang menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya sejauh mana perilaku hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja terhadap peraturan penggunaan Bom Ikan yang dibuktikan dengan adanya pengguna bom Passif.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pola Perilaku Hukum Nelayan

Kategori	Frekuensi	
	Absolut	Relatif
Tidak pernah	10	31,25
Kadang-kadang	15	46,87
Selalu	7	21,87
Jumlah	32	100%

Sumber hasil wawancara 2015

Tabel 4.6 menunjukkan pola perilaku nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep bahwa 31,25% Nelayan tidak pernah bekerjasama dengan pengguna bom ikan, 46,87% nelayan kadang-kadang bekerjasama dengan pelaku pengguna Bom ikan, 21,87% nelayan selalu bekerjasama dengan pengguna bom ikan. Data ini didukung berdasarkan wawancara sebagai berikut;

Berdasarkan penuturan Rusli :

"kerjasama antara nelayan dengan pa'bareccung ada, Terus terang saya biasa daripada toh, ada Ikan biasanya toh ikan saya liat toh, terkadang Ikan juga sering menjengkelkan dipancing tidak mau makan padahal kalo sudah dikasimi umpan tradisonal, umpan andalan masi' tidak mau makan. Biasama bilang disitu: oh iyo nanti kalo ada *pa'bareccung* saya panggil. Apabila kita kalo panggil *pa'bareccung* biasanya *nakasi* target apa toh."⁴⁷

Lebih lanjut, Kerjasama antara Nelayan pemancing Cumi dengan pengguna Bom Ikan lebih rinci dijelaskan oleh Ukkas sebagai berikut:

*"yarekko pammeng cumi biasa to napadecengi yaro mappakkuaero. Makkeda magari? Ko massappai bale na naitai yaro pammeng cumi e na mega na ita cumi, napoangi pammeng cumie'. Sibalekenna Pammeng Cumi e makkutoro ko naitai maega bale na olli'I Pa'bareccunge'. Nabaling toni mitte' i."*⁴⁸

Artinya,

Nelayan (pemancing cumi) sering kali dibantu oleh pembom ikan, Karena kenapa? Ketika pembom tersebut melakukan pencarian ikan kemudian melihat cumi, dia akan memanggil Nelayan dan menunjukkan lokasi yang banyak cumi. Sebaliknya juga demikian, ketika nelayan melihat banyak ikan akan memanggil pembom tersebut kemudian mereka bagi hasil.

⁴⁷ Rusli, wawancara tanggal 22 januari 2015

⁴⁸ Ukkas, wawancara 25 januari 2015

Adanya kerjasama antara Nelayan dengan pengguna Bom Ikan menggambarkan bagaimana pola perilaku Nelayan di Desa Mattiro Kanja. Nelayan tidak menggunakan Bom Ikan. Namun mereka turut andil dalam hal tersebut. Artinya bahwa nelayan tidak menjalankan ketentuan hukum yang telah berlaku.

Hal diatas dipertegas dengan adanya pernyataan dari Hamja sebagai berikut:

“Sudah lama kita tau itu tentang Undang-Undang *Pa’bareccung*⁴⁹ bahwa dilarang, tapi mau diapa kita bukan aparat jadi dibiarkan. *Siapa tau dilapor nah silaonna nabareccungiki*. Jadi, intinya ketika mereka menggunakan bom ikan kemudian hasilnya banyak, yah kita bantu memungut ikan tersebut. Tidak ada istilah saling menegur cari masing-masing rezekinya.”⁵⁰

Pola perilaku hukum negatif yang dilakukan Nelayan di Desa Mattiro Kanja ternyata tidak hanya sebabkan oleh pemahaman hukum maupun sikap hukum dari Nelayan tersebut. Namun juga di sebabkan oleh keadaan Ekonomi nelayan. Mereka mengetahui bahwa penggunaan Bom ikan jelas dilarang dan aturan hukumnya jelas ada. Akan tetapi, kondisi perekenomian dari nelayan tidak mendukung.

Menurut Dg. Sore bahwa

“*na isseng ro keda I larang. Apa’ iya’ ro wettunna’ upegau wisseng keda ilarang. Tapi, upegau tommy ka yammi ro’ we’ding magampang-gampang I runtun’. Makko ko e, ko engka uruntu’ tau ma’bareccung biasa ma wamparang makkeda mabela-belaki tapi ko purani yamparang na te’tette I na po gau, leppe’ ni’ idi’. Tapi ko situjuakka lokka ko tasi’e’ na engka wangkalinga, biyasaka lao sappa’ pakkanreyang*”⁵¹.

⁴⁹ Pengguna Bom Ikan

⁵⁰ Hamja, wawancara tanggal 25 Januari 2015

⁵¹ Dg. Sore, wawancara tanggal 21 Januari 2015

Artinya,

mereka tahu hal tersebut dilarang, karena saya dulu sewaktu masih menggunakan saya tahu bahwa dilarang. Tapi, saya tetap mengerjakan karena hal tersebut mempermudah untuk mendapatkan Ikan. Sekarang, ketika saya mendapati kegiatan pemboman ikan, saya menegur mereka agar mereka jauh dari pulau sabutung. Tapi ketika sudah ditegur mereka tetap melakukan, itu terserah mereka saya sudah lepas tangan. Ketika sedang memancing cumi dan saya mendengar ledakan, terkadang saya datang kelokasi pemboman ikan untuk meminta ikan

Setelah dilakukan wawancara dan menganalisis serta mengolah data yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa meskipun Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep tidak secara langsung menggunakan Bom Ikan, Nelayan di Desa Mattiro Kanja masih kurang kesadaran hukumnya. Dalam hal ini telah menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan penjelasan diatas, Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum ternyata tidak hanya dari segi internal. Akan tetapi, juga di pengaruhi oleh faktor pendukung yaitu dari segi pendidikan, ekonomi Nelayan, dan Kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan Nelayan.

1. Pendidikan

Pendidikan jika ditinjau dari sudut pandang yang luas diartikan sebagai suatu fenomena psikis manusia berupa dorongan belajar untuk mendapat pengetahuan baru dari segala jenis pengalaman dan pemikiran

yang muncul di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupannya.⁵² Sementara itu, jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih sempit pendidikan dipahami secara terbatas. Dari sudut pandang ini, pendidikan diartikan sebagai seluruh kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan secara teratur dan terarah.

Pendidikan sangat penting bagi suatu masyarakat maupun individu karena pendidikan akan mempengaruhi bagaimana pola pikir suatu masyarakat baik dalam lingkungannya maupun dalam kehidupan pribadinya. Pendidikan yang dimaksud tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga pendidikan informal.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum seseorang tersebut karena pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan pengetahuan.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Nelayan di Desa Mattiro Kanja

Kategori	Frekuensi	
	Absolut	Relatif
SMA	5	15,62
SMP	2	6,25
SD	16	50
Tidak Sekolah	9	28,12
Jumlah	32	100%

Sumber hasil wawancara 2015

⁵² Suparlan Suhartono, 2010. *Pengantar Ilmu pendidikan*. UNM: Makassar. Hal 25

Berdasarkan hasil penelitian dari 32 Responden, 50% Nelayan Desa Mattiro Kanja memiliki tingkat pendidikan hanya sampai pada SD (Sekolah Dasar), 28,12% tidak sekolah, 6,25% yang sampai pada tingkat SMP dan hanya 15,62% pada tingkat SMA.

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nelayan di Desa Mattiro Kanja cukup rendah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor mempengaruhi kesadaran hukum nelayan. Ketika dikaitkan dengan indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum semua itu dapat diperoleh salah satunya yaitu melalui pendidikan.

2. Kondisi Ekonomi

Nelayan merupakan komunitas yang sangat miskin dan umumnya lebih miskin dari keluarga petani dan pengrajin. Hal ini diperparah dengan kebutuhan ekonomi yang setiap hari semakin meningkat.

Tabel 4.8 Distribusi Nelayan Menurut Jenis Mata Pencaharian Dan Pendapatannya

No	Dusun	Nelayan	Waktu	Harga (Rp.-/Kg)	Pendapatan/Hari (Kg)
1	Utara	Pemancing	2-3 hari	30.000-45.000	1-3/Tidak tentu
2	Selatan	Cumi Pukat/pencari Kepiting	5 jam/hari	50.000- 60.000/bak/25 000-30.000	Tidak tentu

Sumber: hasil wawancara 2015

Tabel 4.7 Menunjukkan mata pencaharian nelayan berdasarkan alat tangkap yang digunakan, waktu yang di habiskan, serta pendapatan setiap harinya. Pada Nomor 1 menunjukkan bahwa waktu yang digunakan nelayan untuk memancing cumi 2-3 hari dengan pendapatan 1-3kg bahkan lebih atau tidak ada sama sekali artinya tidak menentu. Begitupun pada nomor 2, meskipun waktu yang digunakan lebih sedikit, akan tetapi penghasilan juga bergantung pada keberuntungan. Terkadang banyak terkadang sedikit bahkan tidak sama sekali.

Data ini memberikan sebuah pemahaman, tentang keterkaitan antara kesadaran hukum Nelayan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyak Nelayan yang mengetahui bahwa penggunaan Bom Ikan merupakan tindakan melanggar hukum, namun tetap melakukannya.

Hal ini dipertegas oleh Dg. Sore sebagai berikut:

*“na isseng ro keda I larang. Apa’ iya’ ro wettunna’ upegau wisseng keda ilarang. Tapi, upegau tommy ka yammi ro’ we’ding magampang-gampang I runtun’.”*⁵³

Artinya,

Mereka tahu bahwa penggunaan Bom Ikan tindakan yang dilarang. Dulu sewaktu masih menggunakan, saya tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Namun, saya tetap melakukannya karena hal itu lebih memudahkan untuk mendapat ikan.

⁵³ Dg. Sore, Wawancara tanggal 1 februari 2015

Lebih lanjut, Dg lewa menyatakan: “*engka larangeng tapi yatonaro assapparennna’*.”⁵⁴

Artinya,

Larangan jelas ada, tapi itu sudah menjadi mata pencahariannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, memperjelas bahwa tingkat kesadaran hukum Nelayan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi Nelaya tersebut. Masyarakat Nelayan memegang prinsip *Lebih baik mate maddarae Na mate malupu e’*.⁵⁵ ada *siri* ⁵⁶ yang mendalam dari dalam hati mereka, hal ini terbukti ketika mereka celaka, bahkan ada yang tangan dan kakinya buntung tapi mereka tetap saja melakukan pemboman ikan.

Sebagaimana penuturan Nurdin bahwa

“*engka pura terjadi tapi mateni kapang itella’ Puang Aji Uhaseng, narempe’mettokki’ Bareccung ko ma’de’ppe’ki. Yaro pokko’ni, lennye’ni sipolo karemengna, na napigau’mupa pa’ naseng yaro paenre’ka mekka.*”⁵⁷

Artinya,

Ada yang pernah terjadi, tapi mungkin orang tersebut telah meninggal. Dia bernama Puang Aji Uhaseng, orang tersebut akan melempar dengan menggunakan bom ikan ketika ada orang yang mendekat. Orang tersebut sudah buntung, jari-jari tangannya sudah hilang separuh, namun masih tetap menggunakan Bom Ikan. alasannya karena hal tersebut yang membuatnya ke Mekah/Tanah Suci).

⁵⁴ Dg. Lewa, wawancara tanggal 1 Februari 2015

⁵⁵ (Lebih baik mati berdarah daripada mati karena kelaparan) Gaffar Patappe’, *Pengabdianku untuk Rakyat*. Hal 38

⁵⁶ Rasa malu

⁵⁷ Nurdin, Wawancara tanggal 26 januari 2015

Berdasarkan penuturan Nurdin, menggambarkan bahwa di jaman modernisasi ini kebutuhan ekonomi semakin meningkat dan pola hidup Nelayan yang dulunya sederhana telah berubah mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, penghasilan Nelayan tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut. Sehingga Nelayan mencari alternative lain guna memenuhi kebutuhannya.

Disisi lain, peran pemerintah sangat dibutuhkan guna mengurangi pelaku pembom ikan baik aktif maupun passif. Penggunaan bom ikan tidak hanya merupakan perilaku melanggar hukum. Namun juga mengancam kehidupan biota laut, tentunya hal ini tidak hanya berdampak bagi laut itu sendiri tapi juga berdampak bagi Nelayan.

3. Kurangya Kerjasama antara Pemerintah dan Nelayan

Salah satu indikasi mengapa nelayan di Desa Mattiro Kanja memiliki kesadaran hukum yang rendah yaitu menurut peneliti kurangya kerjasama antara pemerintah dengan Nelayan. Kemudian inilah yang melahirkan adanya pelaku pembom passif serta kurang perdulinya nelayan terhadap pelaku pembom Ikan.

Sebagaimana keterangan Agus:

*“idi’ silaku-laku ma’pisangka, idi tomma matu’ kennai akiba’ na. Balakangmi idi’ runtu’ masalah. Nappa’ percuma mi apa’ yaro tau mappegau e’, sitongenna engka polisi katenni, bagi hasil mi. itikkeng si danna’ paling siyesso’ dua ngesso’ leppe’ si’. Asengmi yaro itikkenna’”.*⁵⁸

Artinya,

⁵⁸ Agus, wawancara tanggal 5 Februari 2015

Setengah mati kita menegur, kita sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Malahan kita yang mendapat masalah. Melapor itu hanya tindakan percuma karena orang yang melakukan bom ikan sebetulnya bekerjasama dengan polisi, malahan mereka bagi hasil. Seandainya mereka di tangkap paling satu atau dua hari sudah bebas, itu hanya kedok”.

Wawancara diatas telah menunjukkan kerjasama antara Pemerintah dengan Nelayan. Nelayan sebenarnya bisa mengambil tindakan, tapi tidak adanya dukungan dari penegak hukum mengakibatkan nelayan takut untuk melakukan tindakan. Selain itu, sikap Pemerintah yang kurang tegas ini, malah menghasilkan pengguna bom ikan secara passif.

Selanjutnya, menurut Nire’:

*“tegai elo’ I lapor? Iresseng makkeda harus di lapor, tapi siapa tahu na issengki matu, lettu’ ki koromai nabareccungiki silaonna. Yaro polisi e’ na isseng keda engka mappakuro, tapi engka istilah selama kantong lubangnya menghadap keatas”.*⁵⁹

Artinya,

Kita harus melapor dimana? Kita tahu bahwa hal tersebut harus dilapor. Tapi siapa tahu ketika melapor mereka tahu, nantinya teman mereka akan membom kita. Sebenarnya polisi tahu bahwa ada yang melakukan pemboman ikan. Tapi ada istilah yang mengatakan selama kantong lubangnya menghadap keatas”.

Tanpa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan Malah hanya akan menambah kasus penggunaan bom ikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan.

⁵⁹ Nire’ wawancara tanggal 11 Februari 2015

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Ada atau tidaknya pengguna bom ikan, tidak menjamin tinggi maupun rendahnya kesadaran hukum Nelayan. Bisa saja mereka tidak melakukan karena kurang modal, takut cacat atau tidak memiliki kesempatan. Oleh karena itu, kesadaran hukum di butuhkan di Desa Mattiro Kanja ini agar sekiranya Nelayan lain bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memberantas pelaku penggunaan bom ikan. Selain itu, dapat mengurangi kemungkinan Nelayan bekerjasama dengan pengguna bom Ikan (pembom passif).

4) Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum

Sebuah masalah tidak akan selesai tanpa adanya sebuah solusi. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom Ikan, maka diperlukan sebuah Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom ikan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep;

1. Sosialisasi/ Penyuluhan Undang-Undang

Peningkatan kesadaran hukum tidak sekedar penting. Tapi juga untuk mewujudkan pembangunan Nasional. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran hukum. Salah satu cara yang ditempuh yaitu di perlukan adanya sosialisasi ataupun penyuluhan. Penyuluhan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 ayat 2 menegaskan:

Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengertian diatas, telah menjelaskan bagaimana pentingnya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum nelayan. Sebagaimana penuturan Ibu Sanawiah (staff Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep) Sebagai berikut:

“sudah banyak upaya yang dilakukan perikanan untuk meningkatkan kesadaran hukum nelayan terutama yang dilakukan itu adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang, adanya COREMAP yang ditempatkan di tiap-tiap Desa. COREMAP inilah yang kemudian memiliki program seperti melihat bagaimana pola perilaku nelayan, pemberian dana bantuan alternatif dan mendirikan pondok informasi.”⁶⁰

Lebih lanjut, Bapak Abdurrahman (Staff COREMAP) menyatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan tentunya dengan memberikan pengetahuan pada Nelayan melalui sosialisasi, penyuluhan, lokakarya. Terkadang juga ketika saya menangkap basah pelaku pengguna bom ikan saya melakukan pengejaran dan sudah tentu kita memberikan penyadaran bahwa pemboman ikan sangat merugikan Nelayan.”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas, menggambarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan. Untuk lebih memperjelas upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk

⁶⁰ Hawaiah (staff Dinas Perikanan Kab. Pangkep), wawancara 30 Desember 2014

⁶¹ Abdurrahman (staff COREMAP Desa Mattiro Kanja Kab.Pangkep), wawancara 19 februari 2015

meningkatkan kesadaran hukum nelayan, maka diperlukan pendapat dari Nelayan itu sendiri.

2. Pemberian Bantuan

Berikut penuturan Dg. Mone selaku tokoh Masyarakat menyatakan:

”Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan Bom Ikan maupun meningkatkan kesadaran hukum Nelayan, menurut saya yaitu dengan pemberian bantuan dana untuk membuat usaha sampingan bagi Nelayan. Salah satu contohnya, pembudidayaan rumput laut.”⁶²

Sebagaimana penuturan Dg. Mone, menjelaskan bahwa salah satu alasan Nelayan menggunakan Bom Ikan karena faktor Ekonomi Nelayan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dana untuk mengembangkan usaha Nelayan dan pemberian modal untuk membuat usaha lain. Selain dari bantuan modal, pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa pemberian pukat serta kapal katin-ting bagi Nelayan yang ada di Desa Mattiro Kanja.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, upaya lain yang dilakukan pemerintah yaitu pengembangan koperasi di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep. Sehingga kedepannya Nelayan tidak lagi bergantung pada penggunaan bom Ikan sebagai jalan satu-satunya.

Hasil wawancara diatas, memberikan suatu penjelasan tentang upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum

⁶² Dg. Mone (Tokoh Masyarakat sekaligus Nelayan), wawancara tanggal 17 Februari 2015

Nelayan. Sekiranya upaya tersebut tidak hanya sebagai wacana ataupun hanya sekedar program kerja.

B. Pembahasan

Mengacu pada landasan teori dan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat di kemukakan pembahasan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan Di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep

Tingkat Kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep tergolong rendah. Data ini diperoleh berdasarkan hasil analisis peneliti dengan menggunakan indikator kesadaran hukum Nelayan yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh, pengetahuan hukum Nelayan tinggi. Namun, Tingginya pengetahuan hukum bukan merupakan jaminan bahwa tingkat kesadaran hukum seseorang juga tinggi. Akan tetapi, hal tersebut juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang lain seperti dari segi pemahaman hukum yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan Data yang telah diperoleh bahwa Tingkat pemahaman hukum Nelayan rendah. Rendahnya pemahaman hukum tersebut memberikan dampak pada rendahnya sikap hukum dan pola perilaku hukum Nelayan. Berdasarkan indikator tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja rendah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep yaitu faktor internal:

(1) Pengetahuan hukum Nelayan, sekitar 78,12% Nelayan memiliki pengetahuan hukum cukup tinggi tentang pelarangan penggunaan Bom Ikan.

(2) Pemahaman Hukum Nelayan, berbicara masalah pemahaman hukum Nelayan hanya sekitar 31,25% Nelayan yang memahami Pasal 8 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Nelayan hanya sekedar mengetahui ada Undang-Undang tanpa memahami isi dari Undang-undang tersebut.

(3) Sikap Hukum Nelayan, menunjukkan sekitar 40,62% Nelayan memberikan tanggapan yang sepakat dengan adanya aturan hukum tentang penggunaan bom ikan, 59,37% memberikan respon yang tidak sepakat. Hal ini didukung berdasarkan pernyataan beberapa responden, kurangnya Respon Nelayan terhadap aturan penggunaan bom ikan disebabkan oleh berbagai alasan.

(4) Pola perilaku hukum Nelayan, sekitar 46,87% Nelayan di Desa Mattiro Kanja kadang-kadang melakukan kerjasama dengan pengguna Bom Ikan. Data ini menggambarkan bagaimana pola perilaku hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja. Adanya kerjasama ini disebabkan karena

kurangnya pemahaman hukum Nelayan serta karena adanya faktor eksternal.

Faktor Internal yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum Nelayan yaitu:

- (1) Pendidikan; tingkat pendidikan di Desa Mattiro Kanja tergolong rendah yaitu hanya 15,62% Nelayan mengenyam pendidikan SMA, hal ini berdasarkan keterangan dari 32 Responden di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep. Kaitan antara faktor kesadaran hukum Nelayan dengan tingkat pendidikan sangatlah erat, karena dari pendidikan yang tinggi memiliki perbedaan pola pikir dengan seseorang yang tidak berpendidikan.
- (2) Kondisi Ekonomi; alasan ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar mengapa Nelayan di Desa Mattiro Kanja memiliki kesadaran hukum rendah.
- (3) Kurangnya Kerjasama antara Pemerintah dengan Nelayan; Sikap aparat yang kurang tegas menyebabkan Nelayan di Desa Mattiro tidak mengambil banyak tindakan terhadap pelaku pengguna Bom Ikan, bahkan dari ketidaktegasan tersebut melahirkan pengguna Bom Ikan Passif di Desa Mattiro Kanja.

3. Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan Di desa Mattiro Kanja yaitu:

- (1) Sosialisasi Undang-Undang, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 ayat 2.
- (2) Pemberian bantuan dan alternatif guna meningkatkan kualitas hidup Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep tergolong Rendah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep yaitu: Faktor Internal (1) Pengetahuan hukum Nelayan tinggi, (2) Pemahaman hukum Nelayan rendah, (3) Sikap terhadap hukum rendah, (4) Pola perilaku hukum Nelayan rendah. Faktor Eksternal (1) Pendidikan, (2) Keadaan Ekonomi, (3) Kurangya kerjasama antara Nelayan dengan Pemerintah.
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten pangkep yaitu Melakukan sosialisasi Undang-Undang, adanya COREMAP yang ditempatkan di tiap-tiap Desa, pemberian dana bantuan alternatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, apabila kesadaran hukum Nelayan di Desa Mattiro Kanja Kabupaten Pangkep ingin ditingkatkan maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Lebih Mengintensifkan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan, guna peningkatan kesadaran hukum Nelayan terhadap penggunaan Bom Ikan.
- b. Membangun kerjasama yang baik antara pemerintah dengan Nelayan setempat, dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum.
- c. Pemberian bantuan berupa dana sebagai modal usaha alternatif bagi nelayan maupun bantuan berupa dukungan.
- d. Dinas perikanan memberlakukan hukum dengan tegas sesuai yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan bagi Nelayan yang telah melanggar hukum.

Daftar Pustaka

- Ancok, Djamaluddin. 1982. *Masalah Kesadaran Hukum Dan Pelayanan Hukum, Suatu Tinjauan Psikologi Social. Masalah Yang Disampaikan Pada Seminar Nasional Kesadaran Hukum Kerjasama UGM Dan Kejaksaan Agung RI Yogyakarta*.
- Asmadi. 2004. *Skripsi Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Makassar: UNM.
- Awaluddin. 2008. *Skripsi Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah*. Makassar: UNM.
- Ahmadin. 2009. *Ketika Lautku Tak Berikan Lagi*, Makassar: Rayhan Intermedia.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pustaka Al-Kautsar.
- Bakhri, Syamsul. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: UNM
- Isnaini, Nur. 2009. *Sosial Ekonomi Masyarakat Pedagang Waduk Gajah Mungkur (Study kasus tentang kehidupan sosial ekonomi pedagang sector informal di kawasan wisata waduk Gajah Mungkur Wonogiri)*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- M. Michael Cernae. 1989. *Mengutamakan Manusia Dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta; UI-Press.
- Saifullah. 2006. *Sosiologi Hukum*. Malang: Refika Aditama.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartono, Suparlan. 2010. *Pengantar Ilmu pendidikan*. UNM: Makassar
- Utrecht. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar harapan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Internet

Anonim. *Jurnal Pencemaran laut*. 27, Oktober 2014.

Anonim 1. *[http://www. Cara merakit bom ikan.co.id](http://www.Cara_merakit_bom_ikan.co.id)*. 28, Oktober 2014.

Anonim 2. *<http://ddediary.wordpress.com/2013/09/25/luas-laut-indonesia/>* . 10, Desember 2014